

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM ANTI NARKOBA DI SMP NEGERI 3 SURABAYA

Ela Oktavia Puji Rahayu

Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
E-mail : elaokta25@gmail.com

Sri Setyowati

Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
E-mail : srisetyowati@unesa.ac.id

Abstract: *This study aims to describe about 1) Anti Narcotics Curriculum Planning, 2) Organizing the Anti Narcotics Curriculum; 3) Implementation of the Anti Narcotics Curriculum; and 4) Evaluation of the Anti Narcotics Curriculum at SMP Negeri 3 Surabaya. This study uses the qualitative method with case studies. Retrieval of data using interview techniques, observation and study documentation. Data analysis using data source triangulation, technical triangulation, and member checks. Checking wetness data uses a credibility test, transferability test, dependability test and confirmation test. The results of the research related to the Prevention and Eradication of Narcotics Broadcasting and Circulation (P4GN) Program in the Implementation of Anti-Narcotics Curriculum Management in SMP Negeri 3 Surabaya found research, 1) Anti-Narcotics Curriculum Planning uses a Balanced Scorecard strategy and assistance in planning and forming curriculum programs anti-narcotics; 2) Organizing the Anti-Narcotics Curriculum involves all components in the school and cooperates with related institutions and establish Anti-Narcotics programs to complement the Anti-Narcotics Task Force, Ambassadors and Cadres; 3) The implementation of the Anti Narcotics Curriculum, which is the material for Anti-Narcotics integration which is included in all subjects and the implementation of approved programs such as the socialization of the dangers of drugs, organized the Drug Narcotics School Competition, and the implementation of routine student character training activities; 4) Anti Narcotics Curriculum Evaluation discusses supervision carried out by teachers on changes in student attitudes in daily life in schools which have been discussing both in the absence of students using drugs. Supervision is also carried out by related institutions such as the Surabaya National Narcotics Agency, Education Office, Surabaya City Government and Social Institution.*

Keywords: *P4GN, management, anti narcotics curriculum*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang 1) Perencanaan Kurikulum Anti Narkoba, 2) Pengorganisasian Kurikulum Anti Narkoba; 3) Pelaksanaan Kurikulum Anti Narkoba; dan 4) Evaluasi Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi teknik, dan *member check*. Pengecekan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas. Hasil penelitian terkait Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Implementasi Manajemen Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya menunjukkan bahwa, 1) Perencanaan Kurikulum Anti Narkoba menggunakan strategi *Balanced Scorecard* serta berisi tentang tujuan perencanaan dan proses pembentukan program-program kurikulum anti narkoba; 2) Pengorganisasian Kurikulum Anti Narkoba melibatkan seluruh komponen dalam sekolah dan melakukan kerjasama dengan lembaga terkait serta terbentuk program-program Anti Narkoba meliputi satgas, duta, kader dan pahlawan Anti Narkoba; 3) Pelaksanaan Kurikulum Anti Narkoba yakni integrasi materi Anti Narkoba yang dimasukkan ke dalam seluruh mata pelajaran serta pelaksanaan fungsi program-program yang telah dibentuk seperti sosialisasi bahaya narkoba, mengadakan Lomba Sekolah Resik Narkoba, dan melaksanakan kegiatan rutin pembentukan karakter siswa; 4) Evaluasi Kurikulum Anti Narkoba meliputi pengawasan yang dilakukan oleh guru terhadap perubahan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang selama ini dinilai baik dengan tidak adanya siswa pengguna narkoba. Pengawasan dilakukan pula oleh lembaga terkait seperti BNNK Surabaya, Dinas Pendidikan, Pemerintah kota Surabaya dan Dinas Sosial.

Kata Kunci : P4GN, manajemen, kurikulum anti narkoba

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (pasal 1 UU Narkotika No 35 Tahun 2009). Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Perwali Nomor 65 Tahun 2014). Sedangkan penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika yang tanpa izin dan tidak memiliki hak menggunakan narkotika (UU Narkotika no 35 Tahun 2009). Penggunaan narkotika yang dilakukan tanpa izin dari dokter dan dengan dosis tanpa ukuran dapat menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun mental. Bila masuk ke dalam tubuh, zat atau bahan termasuk kategori Narkotika atau Napza akan mempengaruhi tubuh terutama susunan saraf pusat atau otak sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis, jiwa dan fungsi sosial. Fungsi narkotika secara medis merupakan senyawa psiko tropika yang digunakan untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau untuk pengobatan penyakit tertentu, dengan takaran dosis tertentu, sesuai kebutuhan (FGD Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 mei 2013, Palembang).

Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menunjukkan intensitas yang semakin meningkat dari hari ke hari di hampir semua segmen kehidupan baik tingkatan pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan usia. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia, tanpa ada satu daerah/wilayah yang bebas dari penyalahgunaan narkotika, bahkan korbannya telah menjangkau ke semua lapisan masyarakat, sehingga pada awal tahun 2015 Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia dalam keadaan

darurat narkotika. Berdasarkan data jurnal P4GN tahun 2015 edisi 2016, kasus penyalahgunaan narkotika selama 5 tahun terakhir mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Tersangka penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah tersangka. Pada tahun 2015, jumlah tersangka pada tingkat SD ada 7.112 orang, SMP ada 12.765 orang, SMA ada 30.055 orang, sedangkan mahasiswa ada 1.367 orang.

Tabel 1.1 Tersangka penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah penyalahguna dari tahun ke tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD	5.092	4.980	7.573	7.147	7.112
2	SMP	10.013	9.768	12.216	12.373	12.765
3	SMA	20.503	19.730	23.086	22.708	30.055
4	PT	1.124	1.162	1.137	1.231	1.367
5	TIDAK SEKOLAH	-	-	-	-	33

Sumber: Jurnal Data P4GN 2015 edisi 2016

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa tingkat penyalahgunaan narkotika pada tingkat pendidikan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Baik pada tingkat pendidikan dasar yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Penyalahgunaan narkotika bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan dimana saja dan tentunya dengan berbagai alasan pengguna memakai narkotika. Kalangan pelajar ada berbagai alasan mengapa pelajar mengapa memakai narkotika dimana rasa keingintahuan mereka pada usia remaja yang sangat tinggi untuk mencoba-coba barang haram tersebut. Pendapat tersebut juga diperkuat berdasarkan data dari Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada kelompok pelajar dan mahasiswa di 16 provinsi di Indonesia Tahun 2011 yang dilakukan Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dan didapatkan hasil bahwa Teman adalah orang yang paling banyak menawari narkotika pada pelajar, terutama teman di luar lingkungan sekolah. Tempat yang paling banyak untuk menawarkan narkotika adalah di rumah teman luar sekolah dan di lingkungan sekolah/kampus, sekitar 35%

pelajar/mahasiswa penyalahguna narkoba mengaku bahwa uang saku yang digunakan untuk membeli narkoba. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak pelajar/mahasiswa yang menggunakan uang saku untuk membeli. Berdasarkan hasil survei di atas, dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dilakukan pertama kali karena alasan coba-coba. Teman membawa pengaruh yang cukup besar, selain itu kondisi keluarga yang membuat anak-anak justru dari teman-temannya, dan didapatkan di lingkungan kampus/sekolah. Uang yang digunakan untuk membeli narkoba bersumber dari uang saku mereka sendiri.

Pendidikan merupakan salah satu cara paling efektif dalam mengerem laju penyalahgunaan terutama dikalangan para pelajar yang semakin hari semakin meningkat. Pendidikan merupakan sebuah proses untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Hal tersebut selaras dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut bunyi undang-undang tersebut disimpulkan bahwa pendidikan berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi yang bertaqwa, berilmu dan berkarakter.

Pengertian pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai

dengan pendidikan yang diperolehnya. Ketercapaian fungsi dan tujuan pendidikan tidak terlepas dari kurikulum.

Kurikulum merupakan suatu perencanaan yang memuat tentang proses, strategi, bahan dan metode pelaksanaan pembelajaran. Pendapat tersebut diperkuat dengan penjelasan Rusman (2009:3) yang menerangkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam implementasi kurikulum tidak lepas dari adanya pengembangan kurikulum. Terdapat beberapa pertimbangan dilakukan pengembangan kurikulum guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu bentuk pengembangan kurikulum formal dengan adanya kurikulum terintegrasi.

Kota Surabaya merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta, yang bisa dikatakan Surabaya merupakan kota metropolitan. Perubahan gaya hidup masyarakat, aktivitas industri, laju penduduk serta pendidikan turut menyertai perkembangan kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan perantau, sehingga membuat populasi penduduk kota Surabaya menjadi kota dengan jumlah penduduk terpadat kedua setelah Jakarta. Jumlah penduduk yang berdomisili di Surabaya memang cukup padat sehingga penduduk yang berstatus pelajar juga banyak.

Berdasarkan banyaknya jumlah pelajar di Surabaya tentunya sektor pendidikan memiliki perhatian yang cukup tinggi dari pemerintah kota Surabaya guna membentuk generasi muda Surabaya yang berkualitas. Namun hal tersebut tidak bisa terwujud apabila pelajar di Surabaya khususnya di bidang pendidikan dasar, SMP dan SMA terkena kasus narkoba terlebih menjadi penyalahguna dan pelaku peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 provinsi Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian UI, jumlah penyalahguna narkoba provinsi Jawa Timur terdapat 492.157 orang yaitu paling banyak kedua setelah Jawa Barat di urutan yang pertama. Hal tersebut yang menjadikan kota Surabaya sebagai bagian dari provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang cukup besar memberikan perhatian penuh terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan narkoba. Khususnya di kota Surabaya Sesuai data yang tercatat di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya, dalam dua tahun terakhir ini terjadi peningkatan pengguna dan korban narkoba serta pil dobel L di kalangan pelajar. Pada 2016, tercatat sebanyak 84 pelajar di Kota Pahlawan menjadi pengguna narkoba dan menjalani rehabilitasi. Jumlah tersebut ternyata mengalami peningkatan di 2017, yakni ada sebanyak 101 pelajar yang kecanduan narkoba dan pil dobel L hingga Oktober 2017. Angka itu, rinciannya ada 4 pelajar SD, 63 anak duduk di SMP dan 34 anak pelajar SMA.

Dalam upaya penanggulangan masalah narkoba maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagai bentuk komitmen bersama komponen masyarakat, bangsa dan pihak terkait atas dasar UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk menjalankan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Respon atas Inpres No 12 Tahun 2011, kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota No 65 tahun 2014 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kota Surabaya Tahun 2014-2015. Perwali ini menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun rencana aksi daerah

sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target (pasal 4, Perwali Nomor 65 Tahun 2014). SKPD yang dimaksud merupakan seluruh lembaga dari berbagai sektor di bawah naungan pemerintah kota Surabaya. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Penanggulangan narkoba tidak terlepas dari upaya pencegahan dan pemberantasan. Merujuk pada Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pada bab X, Pembinaan dan Pengawasan, pasal 60 ayat 2 tentang mencegah penyalahgunaan Narkotika, poin c yang menyatakan bahwa dibuatnya UU Narkotika untuk dapat mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas. berdasarkan undang-undang tersebut, secara langsung tertulis bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dari penyalahgunaan narkoba. Hal itu adalah adanya pendidikan yang berkaitan tentang narkoba yang harus diberikan kepada siswa baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan atas.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya menindaklanjuti kebijakan tersebut sesuai dengan program yang telah ditentukan di dalam peraturan maka disusunlah kurikulum anti narkoba. Dinas pendidikan Menginstruksikan Kepala Sekolah dan guru BK se Kota Surabaya menyusun Modul Kurikulum anti narkoba, yaitu kurikulum anti narkoba yang terintegrasi dengan mata pelajaran. Surabaya merupakan *pilot project* sebagai kota pertama yang menerapkan kurikulum anti narkoba. Dimana Launching kurikulum Anti Narkoba dilaksanakan di JX Internasional Expo yang dihadiri oleh Bu Risma Wali Kota Surabaya dan juga Bapak Ikhsan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Hal ini yang membuat Kepala BNN kota Bone-Bone tertarik untuk berkunjung ke Surabaya untuk melihat dan

mengamati menerapkan Kurikulum Anti Narkoba. Kurikulum yang disusun ditujukan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di kota Surabaya.

SMP Negeri 3 Surabaya terletak di tengah Kota Surabaya yang dikelilingi kompleks pertokoan dan perkantoran. Selain itu sekolah tersebut merupakan sekolah idaman di Surabaya. Akses jalan yang mudah diakses dari berbagai penjurus membuat sekolah tersebut memiliki siswa dari SD Negeri dan Swasta dari seluruh kota Surabaya baik yang jaraknya dekat maupun jauh, serta strata ekonomi dan latar belakang keluarga yang beraneka ragam. Dilihat dari letaknya yang berada di jantung kota Surabaya tentu SMPN 3 Surabaya memiliki tantangan lebih besar dalam implementasi Program P4GN dimana wilayah perkotaan tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pergaulan siswa-siswinya.

SMP Negeri 3 Surabaya sejak tahun 2005 sudah mulai gencar dalam kegiatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan tetap konsisten sampai saat ini. Salah satu bentuknya saat ini adalah penerapan kurikulum anti narkoba yang terintegrasi dengan mata pelajaran. Proses penerapan kurikulum berdasarkan pada modul. Modul kurikulum terdiri dari RPP dan Silabus yang diterapkan oleh guru-guru SMP Negeri 3 Surabaya. Menurut Pembina Kegiatan Anti Narkoba, SMP Negeri Surabaya memiliki berbagai program kegiatan di bidang anti narkoba antara lain 1) Duta Anti Narkoba, 2) Satgas Anti Narkoba, 3) Kader Anti Narkoba yang mana program tersebut ada yang sebagian masuk ke dalam ekstrakurikuler. Sekolah juga sering mengikuti event di Bidang Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan sering mendapatkan juara.

SMP Negeri 3 Surabaya merupakan Sekolah Menengah Pertama Tingkat Nasional yang melaksanakan Kurikulum Anti Narkoba. SMP N 3 Surabaya merupakan sekolah pertama kali di Indonesia yang melaksanakan Kurikulum Anti Narkoba dan menjadi pilot project dari pelaksanaan kurikulum anti narkoba di Indonesia. Hal ini

yang membuat Kepala BNN kota Bone-Bone tertarik untuk berkunjung ke Surabaya untuk melihat dan mengamati menerapkan Kurikulum Anti Narkoba, dimana SMP Negeri menjadi tuan rumah yang menerima kedatangan Tim BNN kota Bone-bone.

Berdasarkan rasional dan kekhasan dari kurikulum maka disini peneliti melakukan penelitian yang membahas tentang "Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Implementasi Manajemen Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan studi kasus karena dengan menggunakan pendekatan studi kasus peneliti dapat melakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui keunikan serta mengungkapkan fenomena tentang Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam implementasi manajemen kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum anti narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya secara menyeluruh dengan mendeskripsikan pada konteks khusus dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Surabaya yang terletak di Jl. Praban no 3 Kota Surabaya, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana informan dalam penelitian ini antara lain, Kepala Sekolah, Pembina Sekolah Resik Narkoba, Waka Kurikulum, Guru BK, Guru PAI dan juga Peserta didik.

Penelitian ini menggunakan Teknik observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan di lokasi penelitian. Dokumen-dokumen juga

dijadikan sumber dalam penelitian. Teknik Analisis data dalam penelitian di SMP Negeri 3 Surabaya ini meliputi kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data. Uji keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas yang meliputi triangulasi sumber data, triangulasi teknik dan *member check*; uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya

Kurikulum Anti Narkoba SMP Negeri 3 Surabaya merupakan program-program yang dibentuk dan dilaksanakan baik kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler guna melaksanakan sekolah bersih narkoba dan membentuk generasi bebas narkoba untuk peserta didik di SMP Negeri 3 Surabaya. Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya telah sesuai dengan teori Hamid (2012:16) bahwa kurikulum adalah program yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi peserta didik dan juga sesuai dengan pendapat Nasution (2012:5) yang mengatakan bahwa kurikulum bukan hanya meliputi kegiatan yang direncanakan namun juga semua kegiatan yang berada dibawah pengawasan sekolah yang biasa disebut kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.

Penerapan Program Anti Narkoba sudah diterapkan sejak tahun 2005 yang kemudian Program Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya dikuatkan dengan adanya Inpres No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan P4GN dan Perwali Kota Surabaya No 65 tahun 2014 tentang Rencana Aksi dan Strategi Daerah Bidang P4GN. Berdasarkan definisi dalam perwali, P4GN merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara terus menerus oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha untuk menghindarkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan narkotika. Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya yang didasarkan atas instruksi pemerintah dan juga inisiasi dari kepala sekolah yang kemudian dilaksanakan dan dikembangkan

oleh pembina sekolah resiko narkoba menguatkan pendapat Kaber (1988:13) bahwa fungsi kurikulum salah satunya kurikulum mengandung sejumlah keinginan baik masyarakat dari pemerintah maupun dari ahli atau pembina kurikulum.

Perencanaan kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya didasari adanya sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan BNNK Surabaya, yang kemudian diperkuat dengan SK Dinas Pendidikan tentang pembagian tugas Pelaksanaan P4GN di sekolah. BNNK Surabaya memberikan sosialisasi pembekalan advokasi P4GN. Kemudian Kepala Sekolah dan Pembina Sekolah Resik Narkoba mengadakan sosialisasi kepada guru, karyawan, siswa dan keluarga besar SMP Negeri 3 Surabaya dalam penyusunan perencanaan kurikulum dan program Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya serta menyamakan persepsi dan tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan dan perencanaan kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya diwujudkan dengan adanya "Papan Komitmen" sebagai bentuk komitmen pencapaian tujuan pelaksanaan Sekolah Resik Narkoba. Tujuan kurikulum Anti Narkoba juga diselaraskan dengan Visi dan Misi SMP Negeri 3 Surabaya jika dikaitkan dengan pendapat ahli, maka komponen tujuan kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya telah sesuai dengan penjelasan Tim Dosen UPI (2012:194) bahwa dalam skala makro perumusan tujuan menggambarkan tujuan suatu yang dicita-citakan masyarakat dimana generasi bebas narkoba merupakan cita-cita bersama masyarakat Indonesia dan dalam skala mikro perumusan tujuan kurikulum berhubungan dengan visi misi sekolah.

Fungsi perencanaan kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dengan dasar hukum yang berlaku sesuai dengan pendapat Hamid (2012:51) bahwa perencanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang akan dilaksanakan serta

penetapan tujuan, prosedur atau langkah yang akan diambil dalam pencapaian tujuan.

Background pendidikan kepala sekolah yang telah menempuh beberapa tingkatan dan jurusan yang berbeda membuat beliau begitu humanis dan visioner dalam memimpin suatu organisasi, sehingga dalam perencanaan yang diterapkan di SMP Negeri 3 Surabaya oleh Kepala Sekolah menggunakan strategi *Balanced Scorecard* yang diyakini dengan penggunaan *Balanced Scorecard* dalam perencanaan dapat mempercepat pencapaian tujuan akhir. Pelaksanaan perencanaan yang dilakukan kepala sekolah melalui peningkatan kapabilitas guru yang diawali dengan olah rasa, olah pikir dan olah raga. Adanya strategi ini bertujuan untuk menanamkan tujuan dan komitmen secara mendalam dengan menyentuh relung hati guru dan staf, dengan begitu komitmen yang dibangun dalam menyamakan persepsi dan tujuan sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan kepala sekolah tidak hanya kata-kata saja, namun juga timbul komitmen dalam pelaksanaan perencanaan. Perencanaan kurikulum mengacu pada teori Indrajit (2006:126) bahwa *Balanced Scorecard* dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan visi dan strategi.

Keterlibatan komponen-komponen dalam penyusunan perencanaan Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya memiliki peran yang sangat penting. Adapun komponen yang terlibat dalam penyusunan Kurikulum Anti Narkoba antara lain Tim Pengembang Kurikulum, Tim MGMP Sekolah, dan pembina Ekstrakurikuler, Kaur-kaur dan komite sekolah. Masuknya program P4GN di SMP negeri 3 Surabaya sesuai dengan hasil penelitian Rasul (2013:529) bahwa inisiatif tidak hanya dari kepala sekolah namun juga dari komponen-komponen sekolah.

Perencanaan kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya dilaksanakan setiap tahun sekali pada awal tahun pelajaran baru. Selain itu juga terdapat kegiatan *morning report* yang dilaksanakan setiap hari jumat dimana dalam pertemuan

tersebut membahas tentang evaluasi program yang dilaksanakan seminggu terakhir dan program yang akan datang, dengan begitu kontinuitas program yang ada di SMP Negeri 3 Surabaya dapat terus berjalan. Apabila dikaitkan dengan teori Indrajit (2006) mengenai *Balance Scorecard* maka sesuai dengan salah satu sarana dalam *Balanced Scorecard* yang dapat berguna untuk melakukan peninjauan secara sistemik dan periodik mengenai strategi yang dilaksanakan. Kontinuitas program apabila dikaitkan dengan teori Sukmadinata (2007:21) maka sesuai dengan prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum.

Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya merupakan kurikulum yang dikembangkan sehingga dalam perencanaannya, Kurikulum pengembangan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Hal itu mengacu pada teori Hamid (2012:55) yang mengatakan bahwa pertimbangan pengembangan kurikulum berkaitan pula dengan keadaan ekonomi, sosial dan budaya maka perencanaan pengembangan Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya sesuai dengan pendapat tersebut sehingga dalam perencanaannya Kurikulum SMP Negeri 3 Surabaya berkaitan dengan wacana Aksi Indonesia Bersih Narkoba seperti yang telah dibahas dalam latar belakang penelitian ini bahwa di Indonesia masih banyak yang menggunakan narkoba terutama remaja, Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya bertujuan untuk membentuk peserta didik bebas narkoba serta tercipta generasi penerus bangsa yang berkualitas, apabila dikaitkan dengan teorinya Rusman (2009:21) bahwa perencanaan kurikulum adalah perencanaan-perencanaan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku serta menilai bagaimana perubahannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengorganisasian Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya

Dalam sistem manajemen kurikulum, pengorganisasian merupakan salah satu

aspek dasar dalam pengembangan kurikulum. Pengorganisasian Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya melibatkan seluruh komponen seperti yang disebutkan dalam pembahasan perencanaan kurikulum sebelumnya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian pasca adanya pembekalan dan advokasi dari BNN, SMP Negeri 3 Surabaya membentuk beberapa program yang merupakan hasil dari RTL (Rencana Tindak Lanjut) sosialisasi tersebut adalah: a) Integrasi materi Anti Narkoba ke dalam mata pelajaran; b) Poster dan gambar Anti Narkoba di lingkungan sekolah; c) Pembentukan Satgas, Duta, Pahlawan dan Kader Anti Narkoba ; d) Sosialisasi Bahaya Narkoba; e) Kunjungan ke tempat Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba; f) Karya Tulis Ilmiah oleh peserta didik; g) Pembentukan Konselor Sebaya dan Tutor Sebaya. Apabila dikaitkan dengan teori Rusman (2009:60) mengenai organisasi kurikulum, maka pola atau desain kurikulum yang memudahkan siswa mempelajari bahan serta mempermudah siswa dalam melakukan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif, maka pembentukan program-program anti narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya sesuai dengan teori tersebut dimana dengan dibentuknya program tersebut peserta didik dengan mudah mampu memahami secara mendalam tentang bahaya narkoba.

Organisasi Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya apabila dikaitkan dengan teori Rusman (2009:60) merupakan organisasi kurikulum terpadu yang dijelaskan bahwa organisasi kurikulum harus terpadu (*Integrated*) atau menyeluruh. Seperti halnya Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya dimana materi Anti Narkoba dimasukkan ke dalam setiap mata pelajaran yang telah disusun oleh masing-masing guru mata pelajaran bersama tim MGMP Sekolah kemudian terwujud dalam RPP kurikulum Anti Narkoba. Integrasi kurikulum tersebut memiliki kesamaan apabila dikaitkan dengan hasil penelitian Raufflet (2013) dimana integrasi dilakukan berbasis disiplin ilmu pengetahuan

dan juga sesuai dengan hasil penelitian dari Redden (2017) yang sama-sama melakukan integrasi materi khusus ke dalam kurikulum di *McWhorter School*.

Selain adanya RPP yang pelaksanaannya nanti di dalam kelas, juga terdapat Satgas, Duta, Kader dan Pahlawan Anti Narkoba yang melakukan Sosialisasi ke masyarakat. Organisasi kurikulum tersebut telah sesuai apabila dikaitkan dengan teori Hamalik (2012:10) bahwa kurikulum merupakan interpretasi dari semua aktivitas dan pengalaman siswa yang terorganisasi di bawah arahan SMP Negeri 3 Surabaya. Pembentukan program-program anti narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya juga sesuai dengan hasil penelitian Pina (2015) Usaha pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan Perwali, diantaranya sosialisasi, kurikulum integrasi anti narkoba, TOT, pembentukan konselor sebaya, dan pembentukan kader pemuda anti narkoba.

SMP Negeri 3 Surabaya telah membentuk KOBRA (Komunitas Berantas Narkoba) yang beranggotakan Satgas, Duta, Pahlawan dan Kader Anti Narkoba dimana komunitas ini memiliki fungsi untuk melakukan sosialisasi kepada peserta didik lain dan masyarakat tentang bahaya narkoba. Apabila dikaitkan dengan teori yang dijelaskan oleh Rusman (2009:67) kurikulum inti dalam kurikulum terpadu dalam prosesnya didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola segala aktivitas dan kegiatan sehingga substansi materi yang dipelajari menjadi lebih efektif dan efisien. sosialisasi yang dilaksanakan oleh KOBRA dilaksanakan di lingkungan SMP Negeri 3 Surabaya seperti pasar blauran, BG Junction, Siola, serta pengguna jalan raya. Kerjasama dalam upaya pelaksanaan P4GN SMP Negeri 3 Surabaya dilakukan dengan berbagai pihak lembaga pemerintahan yang dikuatkan dengan adanya Mou dari kedua belah pihak.

Struktur kepengurusan kelas di SMP Negeri 3 Surabaya bisa dikatakan unik, tidak seperti sekolah pada umumnya yaitu dengan menggunakan nama yang berbeda. Bahkan

SMP Negeri 3 Surabaya menyatakan bahwa penamaan struktur pengurus kelas yang berbeda ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Struktur pengurus kelas menggunakan kata manajer yang memiliki arti berbeda dibandingkan dengan ketua kelas, sekretaris dan bendahara. Nama pengurus kelas di SMP Negeri 3 Surabaya antara lain *Material Manager*, *Responding Manager*, *Operational Manager*, dan *Discipline Manager*. Program ini diinisiasi oleh kepala sekolah SMP Negeri 3 Surabaya. tujuan dari penggunaan kata manajer untuk menanamkan mindset kepada kepada peserta didik agar mampu mengelola emosi dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari artinya dapat memajemen dirinya sendiri dengan baik. Pembentukan struktur kepengurusan kelas di SMP Negeri 3 Surabaya telah sesuai dengan teori Rusman (2009:68) bahwa salah satu bagian dari kurikulum terpadu adalah *persisten life* yang merupakan modifikasi dari *social function* yang menjelaskan tentang situasi yang diangkat senantiasa terhadap masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Salah satu situasi yang berkaitan dengan Kurikulum Anti Narkoba adalah situasi mengenai perkembangan individu secara moral yaitu tentang kebebasan individu serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, maka dengan kemampuan manajer diri yang baik akan mampu mencegah dirinya dari sesuatu yang mampu merugikan dirinya sendiri seperti penggunaan narkoba.

3. Pelaksanaan Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya

Pelaksanaan Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya berdasarkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya yang terwujud dalam buku pedoman kurikulum satuan pendidikan SMP Negeri 3 Surabaya sebagai acuan dalam pelaksanaan kurikulum khususnya Kurikulum Anti Narkoba. Pelaksanaan Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya telah sesuai dengan teori dari Saylor (2009) bahwa kurikulum dalam dimensi kegiatan merupakan upaya dalam mewujudkan kurikulum yang masih bersifat

dokumen menjadi aktual dalam serangkaian aktivitas. Dalam pedoman kurikulum SMP Negeri 3 Surabaya Program Anti Narkoba masuk ke dalam pendidikan kecakapan hidup/ pendidikan berbasis kearifan lokal.

Pelaksanaan Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya diterapkan dengan salah satu bentuknya yaitu mengintegrasikan materi anti narkoba ke dalam seluruh mata pelajaran tentunya dengan menyesuaikan materi yang relevan dengan konten materi anti narkoba di setiap mata pelajarannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Cooper (2009) mengenai integrasi teknologi seluler ke dalam mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Penerapan Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya tentunya juga menggunakan RPP dan Silabus Kurikulum Anti Narkoba yang telah disusun oleh Tim MGMP Sekolah. RPP dan Silabus yang disusun merupakan pengembangan dari Modul Kurikulum Anti Narkoba tingkat SMP/MTs yang telah dibuat oleh pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan dan BNNK Surabaya. Apabila dikaitkan dengan pendapat Stanley dan Shore (1957) model pelaksanaan Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya merupakan model *lini staf*. model ini dikembangkan dari atas kebawah dimana gagasan pengembangan kurikulum datang dari pejabat atau administrator pendidikan seperti Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang menginisiasi pembuatan Modul Kurikulum Anti Narkoba yang kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah. selain itu, penyusunan silabus dan RPP sesuai dengan hasil penelitian Widiastuti (2013) konten silabus dikembangkan oleh kelompok guru sekolah/MGMP.

RPP merupakan acuan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di kelas atau bisa disebut dengan perangkat pembelajaran yang wajib dimiliki oleh guru. Guru merupakan kunci implementator kurikulum. Sebaik apapun RPP yang telah disusun namun guru tidak mampu menjadi implementator yang baik maka tujuan dari pembelajaran tidak akan tercapai. Guru harus mampu memahami esensi atas tujuan

kurikulum serta mampu menerjemahkan tujuan khusus dalam pembelajaran dalam hal ini materi kurikulum anti narkoba, sehingga guru di SMP negeri 3 Surabaya mampu meningkatkan penguasaan materi anti narkoba dalam integrasi materi yang disampaikan tentunya dilakukan sosialisasi kepada guru-guru SMP Negeri 3 Surabaya dengan pemateri dari BNN. Pemberian sosialisasi dalam peningkatan penguasaan guru terhadap materi anti narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya menguatkan pendapat Rusman (2009:78) bahwa dalam implementasi kurikulum perlu dilakukan peningkatan kemampuan guru dalam penguasaan kurikulum sehingga perlu adanya program peningkatan kemampuan yang juga penyegaran seperti lokakarya, pelatihan maupun sosialisasi. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian Mandwikini (2016) guru dalam melakukan implementasi kurikulum secara efektif masih membutuhkan pelatihan dan dukungan dalam aspek-aspek tertentu.

Berdasarkan temuan penelitian di SMP Negeri 3 Surabaya, peneliti mendokumentasikan serta menganalisis salah satu RPP yaitu RPP mata pelajaran PAI kelas VIII semester 2 yang membahas mengenai Q.S. Al-Maidah (5): 90–91 dan 32 serta Hadis terkait tentang perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dimana salah satu indikator pencapaian kompetensi dasar tertulis peserta didik dapat menolak tawaran penggunaan narkoba. Dalam penerapannya, berdasarkan temuan penelitian di SMP Negeri 3 Surabaya pada saat proses pembelajaran di kelas, guru menguasai materi anti narkoba serta mampu menyampaikan dengan baik, salah satunya guru PAI. Apabila dikaitkan dengan teori Miller (2009) implementasi Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya sesuai dengan Model TORI (*Trusting, Opening, Realizing, Interpending*) dimana model ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat untuk melakukan perubahan, dengan adanya model ini diharapkan tumbuh minat pada diri guru untuk melakukan perubahan, dalam hal ini perubahan personal dan

perubahan sosial. Guru mampu mendukung peserta didik untuk melaksanakan sosialisasi terhadap warga masyarakat mengenai bahaya narkoba. Selain mampu menggugah masyarakat mengenai bahaya narkoba, perubahan personal pada diri peserta didik juga akan terbentuk seperti sikap percaya diri dan pengembangan karakter individu. Adanya program Anti Narkoba di SMP Negeri Surabaya membuat siswa memahami lebih dalam mengenai dampak dari penggunaan narkoba sesuai dengan hasil penelitian Wulandari (2013:121) bahwa Program P4GN di DIY mampu membuat pelajar mengenal lebih dalam dampak narkoba serta mampu menghindarinya.

Pelaksanaan kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya telah dilaksanakan dengan baik yang didukung oleh komponen keluarga besar SMP Negeri 3 Surabaya guna mewujudkan generasi Indonesia bersih narkoba. Khususnya mewujudkan visi misi sekolah sebagai sekolah kebangsaan yang tangguh menghadapi masa depan, berbudi pekerti, bertatakrama, ramah anak dan bersih narkoba.

Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya juga dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 Surabaya. Ekstrakurikuler terlibat dalam upaya pelaksanaan P4GN dengan memadukan kegiatan pengembangan bakat, minat, serta karakter peserta didik serta pemberian materi tentang bahaya Narkoba. Ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 Surabaya dan memadukan materi ekstrakurikuler dengan materi Anti Narkoba antara lain Pramuka, Karawitan, olahraga, PMR, OSIS, PBB, dan Paduan Suara. Tidak dapat dipungkiri pula bahwasannya materi Anti Narkoba bisa terintegrasi dengan segala bentuk baik bidang akademik maupun non akademik.

SMP Negeri 3 Surabaya juga melaksanakan dalam program Anti Narkoba kehidupan sehari-hari seperti kegiatan sholat dhuha dan sholat dhuhur berjamaah. Pendekatan peserta didik terhadap tuhanannya mampu menjauhkan peserta didik dari sikap

dan perilaku yang menyimpang termasuk penyalahgunaan Narkoba. Memiliki area Zona Anti Narkoba SMP Negeri 3 Surabaya berfungsi sebagai tempat kegiatan Program Anti Narkoba seperti Satgas, Kader, Duta dan Pahlawan Anti Narkoba. Pelaksanaan Kurikulum Anti Narkoba mengacu pada pendapat Nasution (2012:5) bahwa kurikulum merupakan kegiatan yang berada dibawah pengawasan lembaga baik formal maupun nonformal, yang biasa disebut dengan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

4. Evaluasi Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya

Dalam suatu sistem manajemen, evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran strategis. Evaluasi Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya dilaksanakan setiap tahun sekali dengan melibatkan seluruh komponen yang ada SMP Negeri 3 Surabaya. Dalam konsteks pengembangan kurikulum apabila dikaitkan dengan pendapat Doll (2012) maka evaluasi sebagai usaha menyeluruh dan terus menerus guna mengawasi program pendidikan yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali.

Pelaksanaan kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya diapresiasi oleh pemerintah kota surabaya dan juga lembaga terkait yang ikut mengawasi pelaksanaan program anti narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya. Apresiasi yang diberikan baik kepada lembaga SMP Negeri 3 Surabaya maupun kepada Kepala Sekolah merupakan suatu bentuk evaluasi yang mana menunjukkan keberhasilan program kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya. Dikarenakan program Anti Narkoba mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kota Surabaya, hal tersebut juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban SMP Negeri 3 Surabaya dalam upaya pelaksanaan P4GN di tingkat sekolah. evaluasi P4GN yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya terhadap SMP Negeri 3 Surabaya telah sesuai apabila dikaitkan dengan hasil penelitian Suprpto (2008) bahwa

pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan P4GN terhadap SKPD dan Masyarakat termasuk dalam hal evaluasi pelaksanaan P4GN.

Pelaksanaan Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya juga mendapat apresiasi sebagai Juara 1 pelaksana kurikulum Anti Narkoba tingkat Nasional. Berbagai bentuk apresiasi yang juga merupakan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak dalam evaluasi telah sesuai dengan pendapat Hamid (2012:202) bahwa salah satu tujuan evaluasi merupakan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak yang mendukung maupun pihak yang menjadi konsumen kurikulum yang dikembangkan.

Evaluasi Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya melibatkan guru dan staf dalam mengawasi sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jika dikaitkan dengan pendapat Scriven (1998) dalam peranan evaluasi formatif Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya sebagai alat untuk menetapkan apakah program valid dan rasional ada 3 fase. **Pertama** Fase Desain, sebagai sekolah yang menjadi *pilot project* pertama di indonesia yang melaksanakan Kurikulum Anti Narkoba dengan menggunakan modul yang telah disediakan pemerintah tentunya pengawasan dilakukan oleh *desainer* dari kurikulum anti narkoba seperti Dinas Pendidikan, BNNK Surabaya, dan Dinas Kesehatan. **Kedua**, Fase Implementasi. Pelaksanaan evaluasi Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya melibatkan keluarga besar SMP Negeri 3 Surabaya, terutama Guru karena yang sering terlibat dengan peserta didik sehingga lebih efektif dalam melakukan pengawasan dalam keseharian di sekolah mengenai perubahan sikap dan perilaku. Proses yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah penanaman karakter dan mindset peserta didik untuk memiliki kemampuan manajer diri yang baik serta senantiasa mendekatkan diri kepada tuhan. **Ketiga**, Fase Diseminasi. *Morning report* yang dilaksanakan setiap jumat merupakan salah satu agenda yang membahas segala hal

yang sudah dan akan dilaksanakan termasuk kontinuitas Kurikulum Anti Narkoba yang bisa dikatakan baik karena dari pertama launching tahun 2015 sampai sekarang masih terlaksana.

Berdasarkan kesesuaian hasil temuan peneliti di SMP Negeri 3 Surabaya dengan teori yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya telah dilaksanakan dengan baik. Evaluasi kurikulum mampu digunakan suatu refleksi guna keberlanjutan program serta strategi yang digunakan sesuai dengan penjelasan Scriven (1967) bahwa evaluasi merupakan acuan yang digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian Manajemen Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya melibatkan beberapa komponen diantaranya tim pengembang, Kaur, waka-waka, dan komite sekolah. Perencanaan kurikulum Anti Narkoba diawali dengan sosialisasi dan juga berdasarkan pada dasar hukum yang ada. Strategi yang dilakukan menggunakan *balanced scorecard*. Sehingga untuk membangun komitmen seluruh komponen pelaksana kurikulum dilakukan dengan menyentuh relung hati yang paling dalam yang kemudian dilaksanakan melalui proses peneladanan, pembiasaan sehingga menjadi budaya.
2. Pengorganisasian kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah yang kemudian dibentuk program-program unggulan dalam melaksanakan Program P4GN di sekolah. Bentuk program anti narkoba tersebut diantaranya 1) Integrasi Kurikulum, 2) Pembentukan Satgas, Kader, Pahlawan dan Duta Anti narkoba,

- 3) Sosialisasi Bahaya Narkoba, 4) Kunjungan ke tempat Rehabilitasi, 5) pembentukan konselor dan tutor sebaya. Sekolah juga bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait guna mendukung keterlaksanaan kurikulum anti narkoba seperti BNNK, Polsek, Dinas Kesehatan (Puskesmas), Kecamatan, dan Dinas Sosial.
3. Pelaksanaan kurikulum Anti Narkoba dengan mengintegrasikan materi bahaya narkoba ke dalam seluruh mata pelajaran di SMP Negeri 3 Surabaya. Pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh guru yang diwujudkan ke dalam RPP oleh Tim MGMP sekolah. Modul yang digunakan merupakan modul yang disusun oleh pemerintah yang kemudian dikembangkan. Penerapan kurikulum Anti Narkoba juga diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler.
4. Evaluasi kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya dilaksanakan setiap satu tahun sekali yang melibatkan seluruh Kepala Sekolah, Guru, dan komite sekolah. Pelaksanaan evaluasi kurikulum Anti Narkoba bertujuan untuk mengetahui keberhasilan capaian tujuan perencanaan kurikulum serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna pengembangan dan kontinuitas program. pelaksanaan evaluasi juga dilaksanakan oleh BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan (Puskesmas) terhadap sekolah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap keterlaksanaan kurikulum anti narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya.

SARAN

Pelaksanaan penelitian skripsi dengan judul Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Implementasi Kurikulum Anti Narkoba di SMP Negeri 3 Surabaya ini, berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, saran-saran yang dapat

dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah
 - a. Sekolah hendaknya menyusun program kegiatan yang lebih inovatif serta mampu menjaga kontinuitas keberlangsungan program anti narkoba.
 - b. Memperkuat kerjasama dengan dinas terkait dan juga masyarakat sekitar sekolah agar pelaksanaan kurikulum anti narkoba dapat terlaksana lebih maksimal.
2. Bagi Guru
 - a. Meningkatkan kompetensi dan memaksimalkan kinerja guru dengan memberi kesempatan untuk belajar lebih tentang anti narkoba dengan diadakannya pelatihan ataupun workshop anti narkoba mengingat guru memiliki peran penting dalam pelaksanaan kurikulum.
 - b. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terus berusaha menjauhi narkoba dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam kelas maupun di luar kelas
 - c. Menggunakan berbagai macam strategi, metode dan pendekatan dalam mengembangkannya karakter siswa sehingga mampu membentengi diri untuk tidak menggunakan narkoba.
3. Bagi Siswa
 - a. Kesadaran diri siswa dalam untuk mengenal bahaya narkoba meskipun bukan bagian dari satgas, kader, duta atau pahlawan anti narkoba guna mewujudkan generasi berkualitas dan bersih narkoba.
 - b. Selalu bersikap dan berperilaku baik sesuai dengan ketentuan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah serta lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BNN dan Puslitkes UI. 2009. *Survei Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar Indonesia*.

Cooper, John J. 2009. The integration of a Lean Manufacturing Competency – Based Training Course Into University Curriculum. *Journal of Workforce Education and Development*. Online. Vol. 4, Issue 1.

Hamalik, O. 2012. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Hamid, Hamdani. 2012. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*. Bandung : CV. Pustaka Setia

Impres No 12 tahun 2011. Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2005

Kaber, Achasius. 1988. *Pengembangan Kurikulum*. Jakarta : Depdikbud Dirjen Dikti Proyek Pengembangan LPTK

Mandukwini, Nompumelelo. 2016. Challenge Towards Curriculum Implementation in High School in Mount Fletcher District, Eastern Cape. *Jurnal*. Online. (<https://core.ac.uk/download/pdf/83637231.pdf> diunduh pada 26 Mei 2019)

Nasution, S. 2012. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara

Perwali Nomor 65 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kota Surabaya Tahun 2014-2015

Pina, Nuri dan Oedojo Soedirham. 2015. Dukungan Pemerintah dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya. *Jurnal Promosi Kesehatan*. Vol. 3 (2) : hal. 171-174. Surabaya : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Rasul, Djuharis. 2013. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol. 19 (4).

- Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud.
- Raufflet, Emmanuel. 2013. *Integrating Sustainability in Management Education. Department of Management. Vol. 2 hal 439-448.*
- Redden, Lauren Dkk. 2017. *Integration of Contruccion Mobile technologies Into Contruccion Management Curriculum : case Studi. Procedia Engineering 196 (2017) 535-442.*
- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmadinata, Nana Saodih. 1997. *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek.* Bandung : Remaja Rosdakarya
- Suprpto, Heri. 2008. Pengembangan Sistem Informasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Berbasis Web Untuk Mendukung Koordinasi di Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah. (Tesis). Semarang : Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- Tim Dosen UPI. 2011. *Manajemen Pendidikan.* Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widiastuti, Sri. 2013. A Study on The Implementation of English School Based Curriculum in SMA Negeri 5 Denpasar. *Jurnal.* Vol 1.
- Wulandari, Tri. 2016. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta. *skripsi.* Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.